

Analisis Kinerja Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Gresik

Performance Analysis of Stunting Management Policies in Gresik District

✉ **Yusuf Hariyoko, Bintoro Wardiyanto, Falih Suaedi**

Universitas Airlangga, Indonesia

ARTICLE INFO

Stunting,
Kinerja Organisasi,
Span and Depth,
SAKIP,
Kolaborasi Lintas Sektor,
Kabupaten Gresik.

Article History:

Received : 5 Feb 2026

Accepted : 30 April 2026

Publish : 30 Juni 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini mengukur kinerja penanganan stunting di Kabupaten Gresik menggunakan kerangka *Span and Depth*, yang memandang kinerja kebijakan sebagai hasil interaksi antara capaian makro, kinerja organisasi (meso), pelaksanaan layanan (mikro), dan kapasitas pengendalian lintas sektor (*Span*). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan stunting. Teknik analisis data merujuk pada Creswell & Creswell, yang secara berurutan mencakup proses pengolahan dan persiapan data, pembacaan menyeluruh, analisis koding, penentuan deskripsi dan tema, penyajian data, hingga interpretasi. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan menganalisis kesenjangan (*gap*) antara rumusan target kebijakan pada level makro dan meso dengan realita pelaksanaan layanan di lapangan pada level mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level makro, penanganan stunting telah diposisikan sebagai prioritas pembangunan daerah dengan indikator multidimensional. Pada level meso, kinerja diwujudkan melalui indikator kinerja utama lintas dinas sesuai dengan pembagian urusan. Namun, pada level mikro, capaian layanan sektoral belum sepenuhnya berkontribusi terhadap penurunan stunting sebagai *outcome* bersama. Aspek *Span* mengungkap adanya fragmentasi program, kelemahan penajaman sasaran, kesenjangan layanan antarwilayah, serta koordinasi lintas OPD yang belum optimal. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan konvergensi kebijakan, integrasi data sasaran, serta penyelarasan kinerja lintas sektor.

ABSTRACT:

This study measures the performance of stunting management in Gresik Regency using the *Span and Depth* framework, which views policy performance as the result of the interaction between macro-level outcomes, organizational performance (meso-level), service implementation (micro-level), and cross-sectoral control capacity (*Span*). The study employed a quantitative descriptive approach based on secondary data from planning documents and the performance of regional government agencies involved in stunting management. Data analysis techniques, as described by Creswell & Creswell, include data processing and preparation, thorough reading, coding and analysis, description and theme determination, data presentation, and interpretation. Performance indicators were measured by analyzing the gap between policy target formulations at the macro and meso levels and the reality of service implementation on the ground at the micro-level. The results indicate that, at the macro level, stunting management has been positioned as a regional development priority, with multidimensional indicators. At the meso-level, performance is realized through key performance indicators across agencies in accordance with the division of functions. However, at the micro-level, sectoral service achievements have not fully contributed to stunting reduction as a shared outcome. The *Span* aspect revealed program fragmentation, weaknesses in target sharpening, service gaps between regions, and suboptimal coordination across regional government agencies. This research emphasizes the need to strengthen policy convergence, target data integration, and cross-sector performance alignment.

How to Cite:

Hariyoko, Y., Wardiyanto, B., Suaedi, F. (2026). Analisis Kinerja Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Gresik. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 20(1), 57-78. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v20i1.965>.

✉ Corresponding author :

Address : UNAIR Kampus B, Jl. Dharmawangsa Dalam,
Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286
Email : yusuf.hariyoko-2021@fisip.unair.ac.id

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Hal. 57-78

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja dalam kebijakan publik dapat dilihat dengan komitmen bentuk kegiatan dan anggaran yang dialokasikan dan disandingkan dengan serapan anggarannya (Wahyuni, 2023). Selain itu, kinerja kebijakan dapat diukur dari capaian kegiatan dan dampaknya, terutama pada program yang kompleks dan lintas sektor seperti penanganan *stunting*. Dalam konteks kebijakan *stunting*, tingkat realisasi anggaran sering dipandang merefleksikan kapasitas implementasi yang mencerminkan komitmen program melalui belanja yang tepat waktu, kesiapan kegiatan, serta penyaluran layanan kepada sasaran. Wahyuni (2023) menegaskan bahwa mempertimbangkan serapan anggaran dalam pengukuran kinerja membantu melihat keterkaitan antara perencanaan program dan eksekusi di lapangan, sehingga kinerja dari urusan penanganan *stunting* nantinya tidak berhenti pada dokumen kebijakan, tetapi tercermin pada tindakan nyata.

Kinerja pemerintah juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kredibilitas institusional, yang dapat tercermin pada opini audit (Suharyono, 2020). Urusan kinerja pemerintah salah satunya ditentukan oleh opini audit dan capaian pada indikator kinerja yang sudah ditetapkan dan dibebankan. Dalam konteks penanganan *stunting*, hal ini dapat dipahami sebagai sinyal atas ketertiban pengelolaan keuangan dan kepatuhan procedural. Selain itu, peningkatan kualitas dari pengelolaan indikator kinerja berpotensi meningkatkan transparansi, integrasi data, serta kapasitas monitoring. Aspek-aspek tersebut menjadi penting karena program *stunting* melibatkan berbagai perangkat daerah dan memerlukan pelacakan data yang konsisten untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Hubungan antara tugas dan fungsi yang melekat dalam organisasi ini terus menjadi kajian karena adanya

pembagian urusan dan kewenangan yang melatarbelakangi pembagian tugas dan fungsi tersebut. Selain itu, sejauh mana tugas dan fungsi tersebut berkaitan dengan organisasi lain atau lintas sektor perlu diperhatikan dengan baik (Bouckaert & Halligan, 2007). Narasi pembagian dan kedalaman tugas fungsi organisasi tersebut mendorong adanya *Span and Depth* yang harus dikuasai dan dikoordinasikan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan utama (Amici & Cepiku, 2020).

Analisis kinerja yang memadai perlu memasukkan aspek efisiensi ekonomi, karena keberhasilan penanganan *stunting* tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh seberapa optimal anggaran tersebut menghasilkan keluaran dan dampak. Nurafifah dkk. (2022) menyatakan bahwa efisiensi menjadi poin penting dalam pembangunan dan pengelolaan anggaran untuk memastikan kebermanfaatan dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Dalam kebijakan *stunting*, efisiensi dapat ditinjau melalui kesesuaian biaya program dengan capaian layanan dari kegiatan cakupan intervensi gizi, layanan ibu dan anak, bahkan kegiatan sanitasi. Dalam penanganan *stunting* tersebut, tidak jarang terdapat potensi tumpang tindih program, pemborosan administratif, dan ketidaktepatan sasaran. Hal tersebut dapat dihindari dengan menyamakan persepsi dalam penanganan *stunting* yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

Penanganan *stunting* pada praktiknya tidak dapat dilakukan oleh satu aktor tunggal, yaitu perangkat daerah tertentu, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pada kenyataannya di Kabupaten Gresik, kolaborasi penanganan *stunting* dilakukan bersama oleh berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan beberapa dinas lain. Selain itu, media dalam proses distribusi informasi kepada publik, pihak akademik, dan

swasta perlu berkolaborasi (Fathan, 2025). Keterlibatan media dapat memperkuat kinerja kebijakan melalui diseminasi pesan perubahan perilaku, perluasan jangkauan edukasi kesehatan, dukungan terhadap kampanye layanan, serta peningkatan akuntabilitas program melalui ruang publik yang lebih terbuka. Artinya, kinerja kebijakan juga perlu dilihat dari seberapa efektif jejaring kolaborasi dibangun dan dikelola untuk memastikan intervensi yang terintegrasi.

Penanganan *stunting* masih menjadi tugas yang belum terselesaikan sepenuhnya karena kasus *stunting* masih ditemukan di wilayah Kabupaten Gresik (Chofifah, 2025). Kondisi ini mengisyaratkan adanya celah dalam jangkauan program, kualitas implementasi, atau faktor penentu sosial yang masih kuat memengaruhi kerentanan gizi. Karena itu, analisis kinerja tidak cukup berhenti pada indikator administratif, tetapi harus mengaitkan input dan proses anggaran, tata kelola, dan kolaborasi dengan hasil dan dampak, termasuk prevalensi, cakupan layanan, serta ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok sasaran.

Pada saat yang sama, tantangan pengelolaan anggaran tetap menjadi sorotan dalam penanganan *stunting*, karena pemerintah menghadapi banyak persoalan publik lain yang juga menuntut prioritas dan ruang fiskal (Yuliyanto, 2025). Persaingan prioritas ini dapat memunculkan *trade-off*, fragmentasi penganggaran lintas sektor, serta kendala keberlanjutan program dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, dalam usaha untuk merangkai secara utuh keterkaitan antara serapan anggaran, efisiensi, kualitas tata kelola, dinamika kolaborasi, dan realitas bahwa *stunting* masih ada sebagai dasar untuk menilai kinerja secara lebih komprehensif sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan. Hal ini mengakibatkan target penanganan gizi dan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya selaras dengan realitas capaian operasional.

Evaluasi kinerja kebijakan yang selama ini berjalan cenderung bersifat administratif, sehingga belum mampu membedah persoalan secara menyeluruh. Mengukur capaian program *stunting* melalui indikator serapan anggaran atau keluaran operasional secara terpisah. Kesenjangan penelitian inilah yang perlu diisi dengan mengukur kesenjangan antara perencanaan struktural di level daerah dan realitas layanan dasar, sekaligus menilai bagaimana koordinasi lintas sektor tersebut dikendalikan. Oleh karena itu, kerangka *span and depth* (Amici & Cepiku, 2020) sebagai model analisis. Pendekatan ini relevan karena tidak hanya mengukur kedalaman kinerja (*depth*) dari perumusan target (makro), pembagian tugas dan indikator dinas (meso), hingga pelaksanaan layanan langsung ke masyarakat (mikro), tetapi juga mengevaluasi rentang kendalinya (*span*) dalam menjahit fragmentasi tugas antar-organisasi.

Kajian yang sudah ada untuk pengukuran kinerja kebijakan publik melalui serapan anggaran, kualitas tata kelola, maupun efisiensi penggunaan sumber daya, sebagian besar penelitian masih melihat aspek tersebut secara terpisah dan lebih menekankan pada indikator administratif. Dalam konteks kebijakan penanganan *stunting* yang bersifat kompleks dan lintas sektor, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana keterkaitan antara serapan anggaran, efisiensi program, kualitas tata kelola, serta efektivitas kolaborasi antarperangkat daerah dan aktor nonpemerintah berkontribusi terhadap capaian penurunan *stunting* yang nyata. Kondisi masih ditemukannya kasus *stunting* di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen program yang tercermin dalam dokumen kebijakan dan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja kebijakan yang lebih komprehensif dengan

mengintegrasikan dimensi anggaran, tata kelola, efisiensi, dan dinamika kolaborasi lintas sektor untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan *stunting* di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen (Sugiyono, 2015). Proses penelitian ini merupakan meta-analisis pada dokumen sekunder sebagai bahan kajian untuk melihat penanganan *stunting* di Kabupaten Gresik. Fokus penelitian dilakukan dengan pengukuran kinerja sesuai dengan yang dijelaskan oleh Amici & Cepiku (2020), yaitu: komponen *depth* dan *span*. *Depth* terdiri dari tataran makro, yang merupakan analisis pada prioritas pembangunan pada tingkat kabupaten dan bersifat lintas sektor. Meso merupakan analisis pada tataran program dan kebijakan yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Mikro dikaitkan dengan aktivitas pelaksanaan program oleh tenaga teknis yang bersinggungan langsung pada masyarakat. Sedangkan *span* berusaha melihat *gap* yang ada di tujuan kebijakan dan realita yang menjadi capaian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder perangkat daerah Kabupaten Gresik yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Dinas pertanian Kabupaten Gresik, dan Dinas PerindagKop Kabupaten Gresik. Pengambilan data dilakukan pada Agustus 2025 hingga Desember 2025 melalui data terbuka yang tersedia di website masing-masing perangkat daerah. Dokumen yang digunakan adalah dokumen rencana strategis, rencana kerja, laporan setiap perangkat daerah. Dalam upaya meminimalkan bias analisis, data yang digunakan tersebut ditriangulasikan antara rencana dan capaian.

Proses analisis data menggunakan metode dari Creswell & Creswell (2018) dengan 6 tahapan meliputi 1) Mengolah dan mempersiapkan data, 2) Membaca seluruh data, 3) Analisis koding, 4) Deskripsi dan tema, 5) Menyajikan data, dan 6) Interpretasi Data. Tahapan mengolah dan mempersiapkan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen perencanaan strategis dan pelaporan kinerja, seperti RPJMD, Renstra, Renja, dan LKjIP. Tahapan membaca seluruh data dilakukan dengan menelaah target penanganan *stunting* yang dirumuskan secara lintas sektor, mengamati keselarasan narasi antardokumen instansi, serta melihat gambaran awal mengenai realitas capaian kinerja masing-masing perangkat daerah sebelum membedahnya secara lebih mendalam. Tahapan proses koding dilakukan secara deduktif dengan memetakan data dokumen ke dalam kerangka analisis *span and depth*. Tahapan deskripsi tema menghasilkan penemuan pola-pola permasalahan yang konsisten antardinas. Tahapan penyajian data melalui deskripsi naratif yang dikombinasikan dengan penyusunan matriks analisis per perangkat daerah berupa peta Makro urusan, tabel IKU masalah *stunting*, dan tabel analisis Mikro-*Span* per dinas. Pada tahapan akhir interpretasi dilakukan dengan pemenuhan indikator kinerja operasional secara sektoral di tingkat meso dan mikro tidak secara otomatis menjamin penurunan kasus *stunting* di tingkat makro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amici & Cepiku (2020), kinerja organisasi dibagi menjadi *span* dan *depth*. *Span* merupakan kelemahan dalam penanganan masalah yang menjadi tanggungjawab kinerja. *Depth* merupakan potensial aktivitas yang ada pada tataran mikro, meso, dan makro. Dalam kebijakan penanganan *stunting* di tingkat pemerintahan daerah, khususnya Kabupaten Gresik, organisasi tunggal seperti pada tingkat perangkat

daerah. Level menengah nya adalah kebijakan dalam penanganan *stunting* pada Kabupaten Gresik. Sedangkan pada level makro menjadi dampak penurunan balita yang terkena *stunting* dan antisipasi pada ibu hamil yang akan memiliki kandungan sehat dan kuat.

Makro

Aspek makro merupakan hal untuk menentukan ukuran kinerja kebijakan *stunting* dan harus diterjemahkan sebagai kerja wajib dari pemerintah daerah. Hal ini dibebankan pada perangkat daerah sebagai tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan dicantumkan dalam target kinerja perangkat daerah Kabupaten Gresik. Pembagian tugas tersebut juga tidak lepas dari visi dan misi yang sudah diusung. Setelahnya, visi dan misi tersebut diterjemahkan dengan pemilihan urusan dan penentuan indikator kinerja utama (IKU). Pada urusan penanganan *stunting* di Kabupaten Gresik, dapat di petakan dalam beberapa IKU sebagai tujuan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hubungannya dengan penanganan *stunting*. Urusan-urusan tersebut tertuang dalam RPJMD dan dijelaskan dengan Bahasa teknis kebijakan, di antaranya:

- Penurunan balita *stunting* yang diterjemahkan dalam prelevansi *stunting*.
- Penguatan pencegahan pada ibu hamil dan pemberian makan bergizi diterjemahkan dalam Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
- Perbaikan kualitas ekonomi keluarga dalam kesejahteraan sosial dan aksesibilitas pada pangan yang lebih baik.
- Perbaikan kualitas makanan dan pangan yang tersedia masyarakat, karena keterbatasan yang terjadi pada balita *stunting* perlu untuk dilakukan dengan pengawasan dari pangan lokal.
- Ketahanan sistem koordinasi lintas PD, data yang dimiliki konsisten, dan intervensi berkelanjutan lintas tahun anggaran.

Penanganan *stunting* secara makro disajikan pada Tabel 1 merefleksikan karakter masalah pembangunan multi-dimensional yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral tunggal. Penanganan *stunting* mencakup faktor biologis, sosioekonomi, pendidikan, lingkungan, dan tata kelola kebijakan yang saling berinteraksi lintas sektor

Tabel 1. Peta Makro Urusan Penanganan *Stunting* Kabupaten Gresik

No	Urusan	Pengampu Urusan	Kaitan dengan <i>stunting</i>
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan	<i>Leading sector</i> dalam penanganan <i>stunting</i>
2	Pendidikan	Dinas Pendidikan	PAUD sebagai usia sekolah dapat digunakan sebagai pengawasan balita
3	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Antisipasi dan penanganan sistem perlindungan keluarga dan anak
4	Sosial	Dinas Sosial	Kemiskinan yang ada pada level keluarga
5	Pangan dan pertanian	Dinas Pertanian	Ketersediaan dan ketahanan pangan lokal

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

dengan beberapa perangkat daerah yang bertanggung jawab. Dominasi urusan kesehatan dan pendidikan dalam dokumen RPJMD mencerminkan pengakuan terhadap *stunting* sebagai isu *human capital formation*, yang mana intervensi gizi spesifik dan layanan pendidikan usia dini menjadi fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia jangka panjang (Black dkk., 2013). Dalam konteks ini, pembagian urusan yang memberikan porsi terbesar pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan bersifat rasional karena dampak kebijakan pada kedua sektor tersebut paling cepat dan paling terukur terhadap indikator hasil pembangunan manusia (Grantham-McGregor dkk., 2007).

Efektivitas intervensi kesehatan sangat bergantung pada lingkungan sosial dan ekonomi tempat anak tumbuh. Intervensi gizi sensitif seperti perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan pangan juga memiliki kontribusi signifikan dalam menurunkan *stunting* ketika dikombinasikan dengan layanan kesehatan dasar. Dalam kerangka ini, urusan yang diampu Dinas Sosial, Dinas KBPPPA, dan Dinas Pertanian memiliki peran struktural dalam mengurangi kerentanan rumah tangga, meningkatkan kualitas pengasuhan, serta menjamin akses terhadap pangan bergizi. Meskipun porsi narasi dan program sektor-sektor ini relatif lebih kecil dalam dokumen perencanaan, bobot fungsionalnya sangat menentukan keberlanjutan hasil kebijakan *stunting*.

Aspek lingkungan fisik yang menjadi mandat urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki keterkaitan kuat dengan *stunting* dengan hunian dan sanitasi yang buruk. Buruknya sanitasi dan kualitas permukiman meningkatkan risiko *environmental enteric dysfunction*, yang menghambat penyerapan gizi pada anak meskipun asupan makanan mencukupi (Spears dkk., 2013). Hal ini menegaskan bahwa sektor permukiman, meskipun sering

diposisikan sebagai urusan pendukung, memiliki pengaruh tidak langsung tetapi krusial terhadap capaian gizi anak. Dengan demikian, secara makro, pembagian urusan penanganan *stunting* idealnya dipahami dalam kerangka *performance governance* lintas sektor (Riyadh dkk., 2026), di mana kontribusi setiap dinas dinilai bukan dari besarnya porsi program semata, namun juga target kinerja yang dibebankan.

Meso

Pada level kinerja meso ini, yang dinilai adalah peran dari perangkat daerah sebagai mesin kebijakan yang mana nantinya akan dibahas tentang kinerja perangkat daerah. Sejalan dengan peta pada tabel 1 tersebut, dapat ditarik dengan bentuk aktivitas yang dilakukan oleh target kegiatan yang disebut dengan beban kinerja. Beban kinerja tersebut menjadi tanggungjawab yang tertuang dalam RPJMD dan diberikan kepada setiap perangkat daerah. Beban kinerja tersebut ditargetkan dalam RPJMD yang sesuai dengan tabel 1 tersebut kemudian dipilah dan dituangkan dalam tabel 2.

13 IKU yang tertera dalam tabel 2 tersebut dibebankan pada 6 dinas yang punya peran dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Gresik, secara rinci terkait dengan aspek meso pada tiap dinas sebagai berikut:

a. Dinas kesehatan

Pada level meso, kinerja Dinas Kesehatan dalam penanganan *stunting* menunjukkan konsistensi antara mandat organisasi dan intervensi gizi spesifik yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak. Intervensi kesehatan dengan program yang berfokus pada pelayanan antenatal/pasca kelahiran, pemantauan pertumbuhan bayi, dan penanganan gizi buruk, merupakan faktor utama penurunan *stunting* yang menjadi beban kinerja pada dinas kesehatan

Kabupaten Gresik (Yuliana dkk., 2025). Integrasi indikator *stunting* dalam sistem manajemen kinerja dinas memperlihatkan adanya *results-oriented management*, di mana *output* layanan kesehatan diarahkan untuk mendukung pencapaian *outcome* pembangunan

manusia (Daniel dkk., 2023). Namun, peningkatan cakupan layanan kesehatan tidak secara otomatis menghasilkan penurunan *stunting* apabila kualitas layanan dan keberlanjutan intervensi tidak terjaga (Ciptanurani & Chen, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa

Tabel 2. IKU masalah *Stunting* Kabupaten Gresik

No	IKU	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prelevansi Stunting	Rasio	12-11	11-10	10-9	9-8,5	8,5-7	7
2	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks	64,2	65,3	67,6	69,3	70,2	73,3
3	Persentase balita stunting mendapatkan penanganan	Persen	21,1%	18,4%	16%	14%	14%	15%
4	Indeks Pendidikan	Indeks	78,2	79,8	80,8	81,7	82,7	83,6
5	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	80%	81,89%	82,56%	83,78%	84,76%	85,89%
6	Jumlah kasus kekerasan yang berhasil terminasi / jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani *100%	Persen	50%	60%	70%	80%	90%	100%
7	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Persen	0,25%	0,28%	0,29%	0,33%	0,35%	0,37%
8	Persentase Keluarga Terdaftar 9DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	36,09%	38,72%	42,87%	44,25%	45,63%	45,63%
10	Stabilitas Harga Pangan Utama	Persen	10%	9,8%	10%	10%	10%	10%
11	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	-	12%	13%	14%	15%	16%
12	Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik	Persen	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
13	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	Persen	13,72%	16,18%	18,89%	20,32%	21,83%	23,43%

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

tantangan utama Dinas Kesehatan pada level meso bukan sekadar kuantitas layanan, tetapi efektivitas dan kualitas intervensi gizi spesifik.

Pentingnya tata kelola organisasi dan pemanfaatan data kinerja dalam meningkatkan dampak kebijakan kesehatan. Penggunaan informasi kinerja secara aktif oleh pimpinan organisasi publik berkontribusi signifikan terhadap perbaikan hasil kebijakan (Astuti dkk., 2025). Dalam konteks ini, Dinas Kesehatan perlu memperkuat fungsi monitoring dan analisis data *stunting* berbasis wilayah dan kelompok risiko, sehingga intervensi dapat lebih tepat sasaran. Intervensi gizi spesifik akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan mekanisme kolaborasi lintas sektor (Liao dkk., 2021). Oleh karena itu, secara meso, Dinas Kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa usaha, seperti: (1) meningkatkan kualitas layanan gizi dan kesehatan ibu anak melalui penguatan kompetensi tenaga kesehatan dan standar pelayanan, (2) mengoptimalkan penggunaan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyesuaian program, serta (3) memperkuat peran koordinatif dengan OPD lain dalam kerangka konvergensi *stunting*. Rekomendasi ini menempatkan Dinas Kesehatan tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai aktor penggerak tata kelola kinerja dalam sistem penanganan *stunting* yang bersifat multidimensional.

b. Dinas Pendidikan

Pada level meso, kinerja Dinas Pendidikan tercermin dari kemampuannya mengelola sistem layanan pendidikan dasar dan menengah sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Indikator seperti rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)

menunjukkan bahwa dinas ber-fokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan secara institusional (Arqam dkk., 2026). Pendidikan ibu dan keluarga, memiliki korelasi kuat dengan status gizi anak dan penurunan risiko *stunting*, karena pendidikan meningkatkan literasi kesehatan, pola asuh, serta kemampuan ekonomi rumah tangga (Permatasari dkk., 2022). Dinas Pendidikan tidak menangani *stunting* secara langsung, kinerjanya pada level meso berfungsi sebagai pendukung dalam sistem struktural yang memperkuat efektivitas intervensi kesehatan dan sosial.

Peningkatan capaian pendidikan secara agregat belum tentu berdampak optimal apabila tidak disertai dengan pendekatan inklusif dan sensitif terhadap kelompok rentan. Ketimpangan akses pendidikan dari sisi kualitas sekolah, ketahanan ekonomi keluarga, maupun keberlanjutan partisipasi anak usia dini dapat melemahkan kontribusi sektor pendidikan terhadap perbaikan gizi dan pembangunan manusia (Garina dkk., 2024). Secara meso, Dinas Pendidikan perlu memperkuat orientasi kinerjanya tidak hanya pada pencapaian indikator output pendidikan, tetapi juga pada kontribusi lintas sektor, khususnya melalui penguatan PAUD, program bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, serta integrasi edukasi gizi dan kesehatan dalam lingkungan sekolah. Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan meliputi: (1) memperkuat target kinerja yang berfokus pada kelompok rentan dan wilayah prioritas *stunting*, (2) mengintegrasikan indikator pendidikan dengan agenda pembangunan kesehatan dan sosial daerah, serta (3) meningkatkan kolaborasi operasional dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam kerangka konvergensi *stunting*. Pendekatan ini akan menempatkan

Dinas Pendidikan sebagai aktor kunci pembangunan manusia dalam sistem kebijakan publik yang saling terhubung.

c. Dinas KBPPPA

Pada level meso, kinerja Dinas KBPPPA menunjukkan peran strategis dalam mengelola determinasi sosial dan demografis *stunting* melalui pengendalian penduduk, peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak (Cao dkk., 2022). Indikator kinerja seperti *Total Fertility Rate* (TFR), *Contraceptive Prevalency Rate* (CPR), persentase usia kawin pertama di bawah 20 tahun, serta cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak mencerminkan orientasi dinas pada penguatan fondasi keluarga dan siklus kehidupan. Prayitno dkk. (2025) literatur global menegaskan bahwa praktik perkawinan dini, kehamilan usia remaja, dan rendahnya otonomi perempuan berhubungan signifikan dengan risiko *stunting* pada anak akibat keterbatasan kesiapan biologis, sosial, dan ekonomi ibu. Dengan demikian, secara meso, kinerja KBPPPA berfungsi sebagai intervensi hulu (*upstream intervention*) yang menentukan efektivitas intervensi kesehatan dan gizi di level layanan dasar (Erfina dkk., 2025).

Keberhasilan sektor keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sangat bergantung pada kualitas integrasi lintas sektor dan kemampuan mengaitkan indikator kependudukan dengan *outcome* pembangunan manusia (Taofik dkk., 2026). Program keluarga dan gender akan berdampak lebih kuat pada penurunan *stunting* jika terhubung langsung dengan layanan kesehatan ibu-anak, perlindungan sosial, dan edukasi keluarga. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan bagi Dinas KBPPPA pada level meso meliputi: (1) memperkuat indikator kinerja yang secara eksplisit

mengaitkan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan dengan penurunan *stunting*, (2) meningkatkan integrasi data keluarga, remaja, dan anak dengan sistem informasi kesehatan dan sosial daerah, serta (3) memperluas pendekatan berbasis keluarga (*family-centered approach*) dalam program Kampung KB dan ketahanan keluarga. Dengan penguatan ini, Dinas KBPPPA tidak hanya berperan sebagai pelaksana urusan sektoral, tetapi sebagai arsitek sosial pembangunan manusia dalam kerangka konvergensi kebijakan *stunting*.

d. Dinas Sosial

Pada level meso, kinerja Dinas Sosial berperan strategis sebagai organisasi pengelola perlindungan sosial dan penanggulangan kerentanan rumah tangga, yang secara tidak langsung menentukan keberhasilan penurunan *stunting* (Cao dkk., 2022). Fokus utama dinas pada pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penyaluran bantuan sosial, serta rehabilitasi dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menunjukkan bahwa Dinas Sosial berfungsi sebagai gatekeeper akses keluarga rentan terhadap intervensi negara. Literatur menunjukkan bahwa *stunting* sangat berkorelasi dengan kemiskinan multidimensi, ketidaksamanan pangan rumah tangga, dan keterbatasan akses perlindungan sosial, sehingga kualitas kinerja Dinas Sosial pada aspek akurasi data, ketepatan sasaran bantuan, dan kontinuitas perlindungan menjadi determinan penting keberhasilan kebijakan *stunting* lintas sektor (Ruel & Alderman, 2013). Namun demikian, secara meso, kinerja Dinas Sosial masih menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi data, keterbatasan kapasitas pemutakhiran DTKS di tingkat desa, serta

dominasi indikator *output* administratif dibandingkan *outcome* kesejahteraan keluarga. Studi empiris menunjukkan bahwa bantuan sosial tanpa integrasi dengan layanan kesehatan, gizi, dan pengasuhan anak berisiko menghasilkan *limited nutrition impact*, terutama jika tidak dikaitkan dengan perilaku rumah tangga dan layanan dasar (Hidrobo dkk., 2018). Dalam konteks ini, kinerja Dinas Sosial cenderung efektif sebagai instrumen perlindungan sosial jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai *enabler* institusional untuk memutus siklus *stunting* antar-generasi.

e. Dinas Pertanian

Pada level meso, kinerja Dinas Pertanian tercermin dari kemampuannya mengelola sistem produksi, distribusi, dan akses pangan melalui program peningkatan produksi komoditas, stabilisasi harga, diversifikasi konsumsi, serta penguatan prasarana dan penyuluhan pertanian (Tawde dkk., 2025). Indikator seperti rasio ketersediaan pangan per kapita, skor Pola Pangan Harapan (PPH), stabilitas harga pangan utama, dan realisasi pupuk bersubsidi menunjukkan orientasi dinas pada ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Literatur menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang stabil dan diversifikasi produksi pertanian berkontribusi signifikan terhadap perbaikan kualitas diet rumah tangga dan penurunan risiko *stunting*, terutama ketika intervensi pertanian diarahkan pada komoditas padat gizi dan akses pasar lokal. Dengan demikian, secara meso, Dinas Pertanian berfungsi sebagai penopang struktural sistem pangan yang menentukan keberhasilan intervensi gizi sensitif (*nutrition-sensitive agriculture*). Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan saja belum cukup untuk berdampak langsung pada penurunan

stunting apabila tidak terhubung dengan aspek konsumsi, perilaku rumah tangga, dan akses kelompok rentan (Sururi dkk., 2025; Taufiq dkk., 2025). Dampak gizi dari sektor pertanian akan optimal bila disertai integrasi dengan edukasi gizi, pemberdayaan perempuan tani, dan kebijakan perlindungan sosial. Dalam konteks ini, kinerja Dinas Pertanian masih cenderung kuat pada indikator *output* produksi dan infrastruktur, tetapi relatif lemah pada pengukuran *outcome* gizi dan keterkaitannya dengan wilayah rawan pangan dan *stunting*. Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan meliputi: (1) penguatan indikator kinerja yang mengaitkan produksi pertanian dengan perbaikan konsumsi pangan rumah tangga (misalnya PPH di desa prioritas *stunting*), (2) pengembangan program pertanian berbasis gizi melalui dukungan komoditas lokal bergizi dan Kelompok Wanita Tani, serta (3) peningkatan kolaborasi operasional dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam pemetaan dan penanganan kerawanan pangan. Pendekatan ini akan memperkuat peran Dinas Pertanian sebagai aktor kunci kebijakan pangan sensitif gizi dalam kerangka konvergensi penurunan *stunting*.

Mikro dan *Span*

Aspek mikro merupakan proses pelaksanaan layanan langsung pada masyarakat atau pengguna dengan mempertimbangkan fungsi dari perangkat daerah yang ada. 5 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Gresik dalam proses penanganan *stunting* ini perlu saling sinergi terkait tugasnya di pelayanan masyarakat. Lebih lanjut lagi dalam *Span* atau penanganan masalah tersebut dapat dilakukan dengan aktivitas pengendalian secara terstruktur. Untuk analisis dari mikro dan *Span* untuk penanganan *stunting* di Kabupaten Gresik sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Implikasi dari keterkaitan mikro dan *Span* tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kinerja Dinas Kesehatan dalam penanganan *stunting* tidak dapat hanya difokuskan pada peningkatan aktivitas layanan di tingkat puskesmas dan posyandu. Data kinerja mengindikasikan perlunya reorientasi pengendalian kinerja dari sekadar pemenuhan target *output* menuju penguatan mekanisme pembelajaran organisasi. Pada level mikro, praktik layanan yang efektif seperti konseling gizi berbasis keluarga, penelusuran balita berisiko, dan pendampingan berkelanjutan membutuhkan arahan, umpan balik, dan penyesuaian berbasis data yang konsisten dari level dinas. Tanpa sistem *span of control* yang adaptif, praktik mikro cenderung bersifat rutinitas administratif dan kurang responsif terhadap dinamika risiko *stunting* di lapangan.

Penguatan *Span of control* perlu diarahkan pada pengelolaan variasi kinerja antar unit layanan. Variasi ini bukan semata-mata kegagalan pelaksana mikro, melainkan refleksi dari keterbatasan sistem supervisi, distribusi sumber daya, dan pemanfaatan informasi kinerja. Oleh karena itu, Dinas

Kesehatan perlu memanfaatkan data mikro cakupan *antenatal care* (ANC), status gizi balita, kepatuhan kunjungan sebagai instrumen pengendalian strategis, bukan hanya sebagai bahan pelaporan. Praktik ini sejalan dengan temuan literatur performance management yang menekankan bahwa penggunaan informasi kinerja secara aktif oleh manajemen menengah mampu meningkatkan konsistensi implementasi kebijakan di tingkat pelaksana.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan pada aspek mikro dan *Span* meliputi: (1) penguatan supervisi teknis berbasis risiko dengan memprioritaskan puskesmas dan desa berisiko *stunting* tinggi, (2) pengembangan mekanisme umpan balik kinerja yang cepat dan sederhana agar tenaga kesehatan dapat menyesuaikan intervensi secara real time, serta (3) integrasi data mikro lintas program (KIA, gizi, P2P) sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat dinas. Dengan pendekatan ini, Dinas Kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan mikro, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasinya dalam mengelola rentang kendali (*span of control*) yang kompleks. Secara konseptual, temuan ini menegaskan

Tabel 3. Analisis Mikro dan *Span* Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Tugas	Level Mikro (Pelaksanaan)	<i>Span</i> (Pengendalian)	Data Terukur yang Digunakan
Pelayanan Ibu Hamil	ANC oleh bidan & puskesmas	Penetapan target ANC & supervisi teknis	Cakupan ANC per puskesmas
Pemantauan Balita	Penimbangan & pencatatan Posyandu	Validasi & konsolidasi data	% balita ditimbang dan % data valid
Penanganan Gizi Buruk	Tatalaksana kasus individual	SOP rujukan & monitoring kasus	% kasus tertangani sesuai standar
Konseling Gizi	Edukasi ibu & keluarga	Pedoman, pelatihan, monitoring	% ibu sasaran menerima konseling
Pendampingan Risiko Stunting	Home visit keluarga risiko	Penetapan wilayah prioritas	% keluarga risiko didampingi

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

bahwa efektivitas penanganan *stunting* bergantung pada keselarasan antara praktik mikro dan tata kelola pengendalian organisasi, bukan pada intensifikasi salah satu aspek secara terpisah.

b. Dinas Pendidikan

Pada aspek mikro, kinerja Dinas Pendidikan tercermin dari pelaksanaan layanan pendidikan dasar dan PAUD yang berinteraksi langsung dengan peserta didik, pendidik, dan keluarga. Data kinerja menunjukkan bahwa tugas mikro dinas berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan dasar, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, serta pembinaan satuan pendidikan melalui pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam konteks *stunting*, praktik mikro yang relevan meliputi keterlibatan PAUD dalam pemantauan tumbuh kembang anak, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, serta edukasi dasar gizi dan pengasuhan kepada orang tua. Variasi capaian antar satuan pendidikan mengindikasikan bahwa keberhasilan peran mikro Dinas Pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sekolah dan guru, tetapi juga oleh kualitas interaksi sekolah keluarga dan

sensitivitas layanan pendidikan terhadap kebutuhan anak usia dini yang rentan.

Namun demikian, efektivitas praktik mikro tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek *span of control*, yaitu kemampuan Dinas Pendidikan dalam mengendalikan, membina, dan menyelaraskan kinerja satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Data perencanaan dan pelaporan menunjukkan bahwa pengendalian dilakukan melalui penetapan indikator kinerja sekolah, mekanisme pembinaan dan supervisi, serta pemantauan capaian mutu pendidikan. Keterbatasan *Span of control* seperti jumlah satuan pendidikan yang besar, kapasitas pengawas yang terbatas, dan fokus kinerja yang masih dominan pada capaian akademik berimplikasi pada belum optimalnya integrasi isu gizi dan pengasuhan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa pada level mikro, kontribusi Dinas Pendidikan terhadap penanganan *stunting* sangat bergantung pada sejauh mana sistem pengendalian organisasi mampu mengarahkan sekolah dan PAUD untuk menjalankan fungsi pendidikan yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan perkembangan anak.

Tabel 4. Analisis Mikro dan *Span* Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Tugas	Level Mikro (Pelaksanaan)	Span (Pengendalian)	Data Terukur yang Digunakan
Layanan PAUD	Pembelajaran & stimulasi anak	Pembinaan PAUD & regulasi teknis	APK PAUD per wilayah
Kualitas Guru PAUD	Praktik pembelajaran guru	Pelatihan & sertifikasi	% guru PAUD tersertifikasi
Integrasi PAUD-HI	Edukasi gizi & PHBS	Pedoman & koordinasi lintas OPD	% PAUD menerapkan PAUD-HI
Keterlibatan Orang Tua	Parenting education	Kebijakan & modul pendamping	% PAUD dengan program parenting
Mutu Sekolah Dasar	Proses belajar mengajar	Supervisi & akreditasi	Nilai SNP / akreditasi

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

c. Dinas KBPPPA

Pada aspek mikro, kinerja Dinas KBPPPA tercermin dari pelaksanaan layanan yang berinteraksi langsung dengan keluarga, perempuan, dan anak, khususnya melalui program pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak. Data kinerja menunjukkan bahwa aktivitas mikro dinas diwujudkan melalui layanan KB aktif (CPR, mCPR), pengendalian usia kawin pertama, penguatan kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), serta penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak secara komprehensif. Indikator seperti *Total Fertility Rate* (TFR), *Contraceptive Prevalency Rate* (CPR), persentase usia kawin pertama di bawah 20 tahun, dan cakupan layanan komprehensif kasus kekerasan menjadi representasi kuantitatif dari efektivitas intervensi mikro tersebut. Dalam konteks penanganan *stunting*, capaian mikro ini relevan karena kualitas pengasuhan, perencanaan kelahiran, dan stabilitas keluarga merupakan determinan penting status gizi anak, sehingga capaian IKU KBPPPA dapat diposisikan sebagai indikator tidak langsung kontribusi sektor keluarga terhadap pencegahan *stunting*.

Sementara itu, pada aspek *span of control*, efektivitas kinerja mikro Dinas KBPPPA sangat ditentukan oleh kemampuannya mengendalikan jejaring

pelaksana di tingkat kecamatan, desa, dan kelompok masyarakat, seperti PLKB, kader KB, UPT PPA, Kampung KB, serta organisasi mitra. Dokumen kinerja menunjukkan bahwa pengendalian dilakukan melalui cascading indikator kinerja dari level dinas ke program, kegiatan, hingga pelaksana lapangan, dengan IKU seperti persentase desa yang mengakomodasi usulan perempuan, jumlah OPD yang menerapkan Analisis *Responsif Gender* (ARG), serta tingkat kematangan layanan SPBE. Namun, luasnya rentang kendali ditandai oleh banyaknya desa, kelompok sasaran, dan jenis layanan berpotensi menyebabkan variasi kualitas implementasi di tingkat mikro. Oleh karena itu, dalam tabel IKU yang disusun, penting untuk tidak hanya menampilkan capaian *output* (jumlah layanan, persentase cakupan), tetapi juga indikator pengendalian (frekuensi pembinaan, rasio pendamping terhadap sasaran, dan konsistensi pelaporan), sehingga hubungan antara kapasitas pengendalian organisasi dan kualitas layanan mikro dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan berbasis data.

d. Dinas Sosial

Pada level mikro, Dinas Sosial berperan strategis dalam penanganan determinasi sosial *stunting*, terutama melalui pemenuhan kebutuhan dasar keluarga berisiko *stunting*. Berdasarkan dokumen Renja dan LKjIP, intervensi mikro Dinas Sosial terwujud dalam program

Tabel 5. Analisis mikro dan *Span* Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik

Tugas	Aspek Mikro (Pelaksanaan)	Aspek <i>Span</i> (Pengendalian)
Keluarga Berencana	Layanan KB ke pasangan usia subur	Pembinaan PLKB & Kampung KB
Pendewasaan Usia Perkawinan	Edukasi remaja & keluarga	Regulasi & koordinasi lintas sektor
Ketahanan Keluarga	BKB, BKR, BKL aktif	Pembinaan kelompok Tribina
Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi perempuan desa	Pengarusutamaan gender OPD
Perlindungan Anak	Penanganan kasus anak	Standar layanan & rujukan

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

perlindungan dan jaminan sosial, seperti penyaluran bantuan bagi fakir miskin dan keluarga rentan, rehabilitasi sosial bagi PPKS (termasuk anak terlantar dan keluarga miskin ekstrem), serta peningkatan kualitas data melalui pemutakhiran DTKS. Peran ini krusial karena *stunting* sangat berkorelasi dengan kemiskinan, kerentanan pangan, dan keterbatasan akses layanan dasar. Indikator seperti persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, persentase validitas DTKS, dan jumlah keluarga rentan penerima bantuan menjadi ukuran langsung kontribusi Dinas Sosial terhadap pencegahan *stunting* pada tingkat rumah tangga. Dengan demikian, kinerja mikro Dinas Sosial berfungsi sebagai buffer sosial yang mencegah anak dari kondisi gizi kronis akibat tekanan ekonomi keluarga. Pada aspek *Span*, Dinas Sosial menjalankan fungsi penghubung (*linking actor*) antar sektor melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pemerintah desa, serta kemitraan dengan TKSK, PKH, dan lembaga kesejahteraan sosial. Peran ini memastikan keluarga berisiko *stunting* tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga terhubung dengan layanan kesehatan (pemantauan gizi ibu dan

balita), pendidikan (akses PAUD), dan perlindungan anak. Namun, tantangan utama yang tercermin dalam dokumen evaluasi adalah fragmentasi data dan keterlambatan pembaruan sasaran, yang berpotensi mengurangi efektivitas intervensi lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan integrasi DTKS dengan data *stunting* Dinas Kesehatan serta penggunaan indikator kinerja lintas OPD dalam tabel IKU (misalnya cakupan keluarga rentan berisiko *stunting* yang menerima bantuan terintegrasi) menjadi kunci untuk meningkatkan dampak kebijakan secara sistemik dan berkelanjutan.

e. Dinas Pertanian

Pada aspek mikro, kontribusi Dinas Pertanian terhadap penanganan *stunting* diwujudkan melalui penyediaan dan peningkatan akses pangan bergizi di tingkat rumah tangga dan komunitas. Data kinerja menunjukkan bahwa tugas operasional dinas berfokus pada peningkatan produksi komoditas pangan utama dan pangan lokal, pengendalian kerawanan pangan, serta diversifikasi konsumsi melalui pemberdayaan kelompok tani dan kelompok wanita tani. Indikator seperti rasio ketersediaan pangan per kapita, skor Pola Pangan Harapan (PPH), persentase penanganan daerah rawan pangan, dan jumlah

Tabel 6. Analisis mikro dan *Span* Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Tugas Dinas Sosial	Aspek Mikro	Aspek <i>Span</i>	Indikator Terukur
Perlindungan Sosial	Penyaluran bansos keluarga rentan	Penetapan sasaran & verifikasi DTKS	% keluarga miskin terlindungi
Rehabilitasi Sosial	Pendampingan PPKS	Koordinasi SLRT & TKSK	% PPKS tertangani
Penanganan Kemiskinan	Intervensi keluarga miskin ekstrem	Integrasi program lintas OPD	Penurunan kemiskinan ekstrem
Pemutakhiran Data	Validasi DTKS desa	Sinkronisasi data lintas sektor	% DTKS valid
Rujukan Layanan	Rujukan keluarga berisiko	Sistem layanan terpadu	% rujukan tertindaklanjuti

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

kelompok tani yang diberdayakan mencerminkan bahwa peran mikro Dinas Pertanian berkontribusi langsung pada determinan tidak langsung *stunting*, khususnya kecukupan dan keberagaman konsumsi pangan rumah tangga. Namun, capaian mikro ini cenderung masih berorientasi pada output produksi dan distribusi, sehingga dampaknya terhadap kelompok sasaran *stunting* seperti rumah tangga dengan balita dan ibu hamil belum sepenuhnya terukur secara spesifik.

Sementara itu, pada aspek *span of control*, efektivitas peran Dinas Pertanian dalam penanganan *stunting* sangat ditentukan oleh kemampuan pengendalian lintas wilayah dan lintas pelaku dalam sistem pangan daerah. Data *cascading* kinerja menunjukkan bahwa dinas mengendalikan pelaksanaan program melalui mekanisme perencanaan berbasis kawasan, penyusunan peta kerentanan pangan, pengawasan keamanan pangan segar, serta koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Indikator *Span* seperti persentase keamanan pangan segar, stabilitas harga pangan utama, dan jumlah penanganan daerah rawan pangan menggambarkan fungsi strategis Dinas Pertanian dalam menjaga

lingkungan pangan yang kondusif bagi pencegahan *stunting*. Namun demikian, keterbatasan integrasi indikator pertanian dengan indikator gizi dan kesehatan menunjukkan bahwa *span of control* masih perlu diperkuat, terutama dalam menyelaraskan target ketahanan pangan dengan lokasi prioritas *stunting* dan kebutuhan gizi spesifik kelompok rentan. Hal ini menegaskan bahwa kontribusi Dinas Pertanian terhadap penurunan *stunting* akan lebih optimal apabila pengendalian program pangan diarahkan secara lebih terfokus pada sasaran rumah tangga berisiko *stunting*, bukan semata pada capaian ketahanan pangan makro.

Aspek *Span* dari keseluruhan kajian ini berkaitan dengan adanya beberapa hal yang dikaitkan dengan kinerja penanganan *stunting* di Kabupaten Gresik, diantaranya:

- a. Fragmentasi program yang berhubungan dengan program paralel dari perangkat daerah, tetapi tidak saling memperkuat. Hal ini berhubungan dengan tugas dan fungsi yang diemban, misalkan intervensi gizi yang tidak tersambung dengan sanitasi, perlindungan sosial, dan edukasi keluarga. Hal ini perlu disandingkan agar dapat menggambarkan penanganan yang konsisten.

Tabel 7. Analisis mikro dan *Span* Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Tugas Dinas Pertanian	Aspek Mikro (Pelaksanaan)	Aspek <i>Span</i> (Pengendalian & Koordinasi)	Indikator Terukur
Ketersediaan Pangan	Produksi pangan lokal	Pengendalian produksi wilayah	Rasio ketersediaan pangan
Diversifikasi Pangan	Pengembangan pangan lokal	Pembinaan kelompok tani/ KWT	Skor PPH
Penanganan Rawan Pangan	Intervensi daerah rawan	Pemetaan & prioritasasi wilayah	% daerah rawan tertangani
Keamanan Pangan Segar	Pengawasan pangan segar	Sertifikasi & pengendalian mutu	% pangan segar aman
Stabilisasi Harga Pangan	Distribusi & pasokan	Koordinasi lintas sektor	Fluktuasi harga pangan

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

- b. *Targeting* yang lemah dan kadang kurang tepat. Hal ini berkaitan dengan data sasaran dari penanganan *stunting* ini tidak tunggal, sehingga perlu adanya analisis pada keluarga risiko *stunting*, pendataan ibu hamil yang rawan *stunting*, data balita yang gizi kurang sehingga intervensi tidak tepat sasaran akan menjadi catatan dalam proses kinerja organisasi.
- c. Kesenjangan layanan dan belum terstandar berkaitan dengan layanan puskesmas/posyandu butuh dijangkau ulang dengan analisis faktor lingkungan yang sering tertinggal.
- d. Koordinasi dan akuntabilitas yang perlu diselaraskan oleh Bappeda yang bertanggung jawab untuk menentukan indikator.

Gambaran keseluruhan penanganan *stunting* di Kabupaten Gresik pada lampiran 1. Analisis terhadap tata kelola penanganan *stunting* di Kabupaten Gresik pada lampiran 1 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pada level sektoral belum sepenuhnya berimplikasi pada penyelesaian masalah secara makro. Kinerja organisasi lintas sektor masih diwarnai fragmentasi program, di mana setiap perangkat daerah cenderung berorientasi pada pemenuhan target luaran (*output*) administratif dan penyerapan anggaran yang diukur secara parsial melalui IKU. Praktik operasional yang berjalan secara paralel tanpa orkestrasi yang kohesif mengakibatkan kelemahan dalam akurasi penajaman sasaran serta memunculkan kesenjangan kualitas layanan di tingkat lapangan. *Stunting* adalah persoalan multidimensional yang mencakup faktor biologis, sosioekonomi, dan lingkungan. Penanganannya tidak dapat diselesaikan melalui aktor tunggal, melainkan mutlak menuntut *performance governance* yang melembaga kolaborasi dan akuntabilitas antar organisasi secara menyeluruh (McBeath & Meezan, 2010).

Kinerja lintas sektor dapat diperkuat melalui implementasi kebijakan yang mendorong konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif yang terlembaga. Layanan kesehatan dasar yang dieksekusi oleh Dinas Kesehatan harus diintegrasikan dengan *upstream intervention* (Nandigama, 2020), seperti pemenuhan perlindungan sosial oleh Dinas Sosial, edukasi ketahanan keluarga dan pengasuhan oleh Dinas KBPPPA, serta penyediaan akses pangan lokal oleh Dinas Pertanian. Sinergitas ini mensyaratkan integrasi basis data lintas sektor, khususnya sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan data sasaran kesehatan ibu dan balita. Pemanfaatan data kinerja terpadu melalui platform Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu kemensos atau inovasi daerah lainnya akan mengeliminasi tumpang tindih program dan memastikan bahwa keluarga dengan risiko *stunting* tinggi menerima intervensi komprehensif, bukan sekadar komoditas layanan yang terpecah-pecah.

Optimalisasi kinerja kolaboratif ini membutuhkan transformasi pada aspek rentang kendali (*span of control*) agar menjadi mekanisme pengendalian yang lebih adaptif (Dwivedi dkk., 2022). Aspek *span* tidak boleh lagi direduksi sekadar menjadi jalur pelaporan rutinitas birokrasi, melainkan harus difungsikan sebagai ruang evaluasi strategis untuk mengelola dan memitigasi variasi kualitas layanan pada tingkat mikro. Pemerintah daerah perlu merumuskan indikator kinerja kolaboratif (*shared outcomes*) yang mampu mengikat komitmen antar-perangkat daerah secara horizontal. *Span of control* yang berorientasi pada umpan balik responsif dan pemanfaatan informasi kinerja lintas sektor sebagai instrumen pengambilan keputusan, eksekusi layanan operasional akan secara simultan menopang keberhasilan penurunan prevalensi *stunting* sebagai capaian pembangunan manusia yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Dalam konteks makro, pemerintah daerah Kabupaten Gresik telah menetapkan penanganan *stunting* sebagai prioritas kebijakan dengan tujuan utama menurunkan prevalensi *stunting* melalui perencanaan, penganggaran, dan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi. Tujuan kebijakan ini kemudian diturunkan ke tingkat mikro dalam bentuk program dan aktivitas masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti layanan kesehatan dan intervensi gizi oleh Dinas Kesehatan, perlindungan sosial oleh Dinas Sosial, serta penguatan pendidikan dan PAUD Holistik Integratif oleh Dinas Pendidikan. Dalam proses implementasi tersebut, fokus kinerja sering bergeser dari capaian *outcome* kebijakan bersama menuju pemenuhan output sektoral, yang diukur melalui peningkatan cakupan layanan, jumlah sasaran, atau intensitas program. Akibatnya, kinerja pemerintahan yang diturunkan pada keberhasilan aktivitas organisasi yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah balita atau keluarga yang dilayani tidak selalu sejalan dengan tujuan kebijakan daerah untuk mengurangi jumlah kasus *stunting* secara keseluruhan, sehingga menegaskan perlunya perhatian pada kinerja organisasi yang saling terhubung dalam penanganan *stunting* di tingkat daerah. Pembagian peran dan aktivitas perlu dibagi dengan jelas, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah tersebut bisa saling terkait dan mendukung satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amici, M., & Cepiku, D. (2020). Performance Management: A Theoretical Framework. In *Performance Management in International Organizations*. 97-114. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39472-1_6
- Arqam, Mhd. L., Firdaus, A. A., Atmojo, A. M., Saputri, G. Z., Furizal, Palahuddin, & Sironpati, R. (2026). Integrating Education-Based Interventions and Machine Learning for Stunting Prevention: A case study in East Lombok, Indonesia. *Dialogues in Health*, 8, 100264. <https://doi.org/10.1016/j.dialog.2025.100264>.
- Astuti, S. J. W., Suindyah Dwiningwarni, S., & Atmojo, S. (2025). Modeling Environmental Interactions and Collaborative Interventions for Childhood Stunting: A Case From Indonesia. *Dialogues in Health*, 6, 100206. <https://doi.org/10.1016/j.dialog.2025.100206>.
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-Income and Middle-Income Countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X).
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2007). *Managing Performance*. Routledge.
- Cao, S., Xie, M., Jia, C., Zhang, Y., Gong, J., Wang, B., Qin, N., Zhao, L., Yu, D., & Duan, X. (2022). Household Second-Hand Smoke Exposure and Stunted Growth Among Chinese School-Age Children. *Environmental Technology & Innovation*, 27, 102521. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102521>.

- Chofifah Q. N. (2025, June 16). *Apa Saja yang Sudah Dicapai Pemkab Gresik dalam 100 Hari Kerja? Ini Daftarnya - Gresik Satu*. GresikSatu.Com. <https://www.gresiksatu.com/apa-saja-yang-sudah-dicapai-pemkab-gresik-dalam-100-hari-kerja-ini-daftarnya/>.
- Ciptanurani, C., & Chen, H.-J. (2020). Association Between Household Structure and Concurrent Stunting and Overweight Among Young Children in Indonesia: Evidence from A National Health Survey. *Current Developments in Nutrition*, 4, 171. https://doi.org/10.1093/cdn/nzaa043_022.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Daniel, D., Qaimamunazzala, H., Prawira, J., Siantoro, A., Sirait, M., Tanaboleng, Y. B., & Padmawati, R. S. (2023). Interactions of Factors Related to the Stunting Reduction Program in Indonesia: A Case Study in Ende District. *International Journal of Social Determinants of Health and Health Services*, 53(3), 354-362.
- Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Baabdullah, A. M., Ribeiro-Navarrete, S., Giannakis, M., Al-Debei, M. M., Dennehy, D., Metri, B., Buhalis, D., Cheung, C. M. K., Conboy, K., Doyle, R., Dubey, R., Dutot, V., Felix, R., Goyal, D. P., Gustafsson, A., Hinsch, C., Jebabli, I., Janssen, M., Kim, Y. G., Kim, J., Koos, S., Kreps, D., Kshetri, N., Kumar, V., Ooi, K. B., Papagiannidis, S., Pappas, I. O., Polyviou, A., Park, S. M., Pandey, N., Queiroz, M. M., Raman, R., Rauschnabel, P. A., Shirish, A., Sigala, M., Spanaki, K., Tan, G. W. H., Tiwari, M. K., Viglia, G., Wamba, S. F. (2022). Metaverse Beyond the Hype: Multidisciplinary Perspectives on Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Research, Practice and Policy. *International Journal of Information Management*, 66(July), 102542. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfor.2022.102542>.
- Erfina, E., Hariati, S., Tawali, S., Nurmaulid, N., Safari, K., & McKenna, L. (2025). Development and Evaluation of Blended Interventions to Prevent Stunting in Children of Adolescent Mothers: A Mixed Methods Study. *Journal of Pediatric Nursing*, 85, 697–705. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2025.10.003>.

- Fathan. (2025, March 25). *Dinas KBPPPA Gresik Gelar Pertemuan Mitra Kerja dalam Percepatan Penurunan Stunting*. Media Pojok Nasional. <https://pojoknasional.co.id/dinas-kbpppa-gresik-gelar-pertemuan-mitra-kerja-dalam-percepatan-penurunan-stunting/>.
- Garina, L. A., Dewi, M. K., Trusda, S. A. D., Purbaningsih, W., Muflihah, H., Tursina, A., Respati, T., & Rahimah, S. B. (2024). Maternal, Child, and Household Risk Factors for Children with Stunting. *The Open Public Health Journal*, 17(1), 1-11. <https://doi.org/10.2174/0118749445321448240823112908>.
- Grantham-McGregor, S., Cheung, Y. B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., & Strupp, B. (2007). Developmental Potential in the First 5 Years for Children in Developing Countries. *The Lancet*, 369(9555), 60–70. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60032-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60032-4).
- Hidrobo, M., Hoddinott, J., Kumar, N., & Olivier, M. (2018). Social Protection, Food Security, and Asset Formation. *World Development*, 101, 88–103. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.08.014>.
- Liao, C., Fei, D., Huang, Q., Jiang, L., & Shi, P. (2021). Targeted Poverty Alleviation Through Photovoltaic-Based Intervention: Rhetoric and Reality in Qinghai, China. *World Development*, 137, 105117. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105117>.
- McBeath, B., & Meezan, W. (2010). Governance in Motion: Service Provision and Child Welfare Outcomes in A Performance-Based, Managed Care Contracting Environment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(Suppl. 1), 101-123. <https://doi.org/10.1093/jopart/mup037>.
- Nandigama, S. (2020). Performance of Success and Failure in Grassroots Conservation and Development Interventions: Gender Dynamics in Participatory Forest Management in India. *Land Use Policy*, 97, 103445. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.061>.
- Nurafifah, I. P., Haliah, H., & Nirwana, N. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Pendekatan *Value for Money* (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)*, 2(2), 8–14.
- Permatasari, A., Sofyan, N., & Walinegoro, B. G. (2022). Stunting Prevention Through Collaborative Governance in the Berbah Sub-district, Sleman. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)* (Vol. 1). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7>.

- Prayitno, G., Zuhriyah, L., Efendi, A., Arifin, S., Rahmawati, Auliah, A., & Subagiyo, A. (2025). Community-Powered Environmental Pathways to Reduce Stunting: Food Security, Social Capital, and Open Innovation in Semi-Urban Indonesia. *Environmental Challenges*, 21, 101350. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101350>.
- Riyadh, H. A., Garad, A., Al-Ansi, A. M., & Beshr, B. A. H. (2026). Synergistic Governance, Integrating Financial and IT Governance for Enhanced Institutional Performance: Systematic Review for Future Path. *Social Sciences & Humanities Open*, 13, 102449. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102449>.
- Ruel, M. T., & Alderman, H. (2013). Nutrition-Sensitive Interventions and Programmes: How Can They Help to Accelerate Progress in Improving Maternal and Child Nutrition?. *The Lancet*, 382, 536–551. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60843-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60843-0).
- Spears, D., Ghosh, A., & Cumming, O. (2013). Open Defecation and Childhood Stunting in India: An Ecological Analysis of New Data from 112 Districts. *PLoS ONE*, 8(9), e73784. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073784>.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyono, S. (2020). Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 11-25. <https://doi.org/10.31851/neraca.v4i1.4148>.
- Sururi, A., Ungku Mohd Nurdin, U. K. bt, Iriany, I. S., & Pasciana, R. (2025). Effective Local Leadership as an Instrument and Model in Stunting Handling in Mongpok Village Serang Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 22(2), 196-213. <https://doi.org/10.31113/jia.v22i2.1291>.
- Taofik, M. J., Satsipi, E., & Hadi, M. (2026). Cultural governance and policy implementation in public health: Accelerating stunting reduction in East Lombok Through Social Integration and Institutional Capacity. *Social Sciences & Humanities Open*, 13, 102360. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102360>.
- Taufiq, M., Nur Afandi, M., & Suzylah Sohaimi, N. (2025). Conceptual Model of Collaborative Planning for Stunting Intervention in the Perspective of Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 22(2), 285–299. <https://doi.org/10.31113/jia.v22i2.1430>.
- Tawde, P. P., Quazi, Z., Gaidhane, A., & Choudhari, S. (2025). Association Between Household Livestock Ownership and Stunting in Children Younger Than 5 Years in Central Rural India: Protocol for a Case-Control Study. *JMIR Research Protocols*, 14, e66576. <https://doi.org/10.2196/66576>.

- Wahyuni, A. (2023). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value for Money* (Studi APBD Provinsi Sumatera Utara 2020-2022). *Communnity Development Journal*, 4(6), 11393–11398.
- Yuliana, Holinesti, R., Tasrif, N., Rahayu, I., Hasanah, A. N., Helmizar, Hidayanti, H., Naserd, Y. F., & Halipah, S. (2025). Formulation, Nutritional Profile, and Sensory Acceptability of Cookies Incorporating Locally Sourced Ingredients as Complementary Foods for Toddlers: A Strategy for Stunting Prevention. *Food Chemistry Advances*, 7, 101017. <https://doi.org/10.1016/j.focha.2025.101017>.
- Yuliyanto, F. (2025, June 20). *DPRD Gresik Beri Catatan Terkait Kinerja Pemkab dalam Laporan APBD 2024*. Radar Gresik. https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/836165714/dprd-gresik-beri-catatan-terkait-kinerja-pemkab-dalam-laporan-apbd-2024#google_vignette.

Lampiran 1. Diagram Depth and Span Penanganan Stunting Kabupaten Gresik

